



# KONSEP PENYELENGGARAAN AKREDITASI PUSKESMAS

drg. FARICAHAN HANUM, M.Kes  
DIREKTUR MUTU & AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN

Disampaikan Pada Pra Rakerkesnas Tahun 2020, Jakarta 18 Februari 2020

# POKOK BAHASAN



PENDAHULUAN



KONSEP PENYELENGGARAAN SURVEI AKREDITASI  
PUSKESMAS



OVERVIEW STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS TAHUN 2020  
(SIAP2020)



DUKUNGAN IT DALAM PENYELENGGARAAN AKREDITASI  
MELALUI SISTEM INFORMASI AKREDITASI FKTP (SIAF)



# PENDAHULUAN

---

# ARAHAN MENTERI KESEHATAN

- PERSIAPAN DAN PENYELENGGARAAN AKREDITASI MEMERLUKAN BIAYA CUKUP TINGGI DAN MENYITA WAKTU, SEHINGGA MEMPENGARUHI PELAYANAN PUSKESMAS
- **IMPLEMENTASI** AKREDITASI PUSKESMAS TERKESAN LEBIH BANYAK FOKUS PADA PENGUATAN UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN, SEHINGGA DIANGGAP KURANG MENDUKUNG UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT TERMASUK PERBAIKAN PELAYANAN PROMOTIF - PREVENTIF DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

## MENYEMPURNAKAN KONSEP PENYELENGGARAAN AKREDITASI PUSKESMAS :

- MENINGKATKAN PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PEMBINAAN DAN PROSES PENYELENGGARAAN AKREDITASI
- BERFOKUS PADA UPAYA PROMOTIF – PREVENTIF DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
- EFISIENSI PERSIAPAN DAN PENYELENGGARAAN AKREDITASI

## MEMINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN MENUJU CAKUPAN KESEHATAN SEMESTA

### Indikator dan Target

Indikator	Baseline	Target 2024	Indikator	Baseline	Target 2024
Insidensi TB (per 100.000 penduduk)	319	190	Persentase rumah sakit terakreditasi	63	100
Eliminasi malaria (kab/kota)	285	405	% puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	23	83
Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9,1	8,7	Persentase puskesmas tanpa dokter	15	0
Prevalensi obesitas pada penduduk umur $\geq 18$ tahun (%)	21,8	21,8	Persentase puskesmas dengan obat esensial	86	96
Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	57,9	80	Persentase obat memenuhi syarat	80,9	92,3
Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	40	100	Persentase makanan memenuhi syarat	71	90

**PENYEMPURNAAN  
SISTEM AKREDITASI  
PELAYANAN  
KESEHATAN  
PEMERITAH DAN  
SWASTA**

# PENGERTIAN DAN PENYUSUNAN AKREDITASI



## PENGERTIAN

AKREDITASI PUSKESMAS ADALAH PENILAIAN DAN PENGAKUAN OLEH KEMENTERIAN KESEHATAN TERHADAP UPAYA PUSKESMAS DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS YANG TELAH DITETAPKAN KEMENTERIAN KESEHATAN SETELAH MENERIMA PEMBINAAN DARI DINAS KESEHATAN

(AKREDITASI ADALAH PENGAKUAN YANG DIBERIKAN OLEH LEMBAGA INDEPENDEN PENYELENGGARA AKREDITASI YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI SETELAH MEMENUHI STANDAR AKREDITASI – PMK No.46/2015)



## PENYUSUNAN

DISUSUN DENGAN MENGACU PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, MELIBATKAN PUSKESMAS, DINKES KAB/KOTA, DINKES PROVINSI, LINTAS PROGRAM, PARA PAKAR MUTU DAN ORGANISASI PROFESI

# MANFAAT AKREDITASI

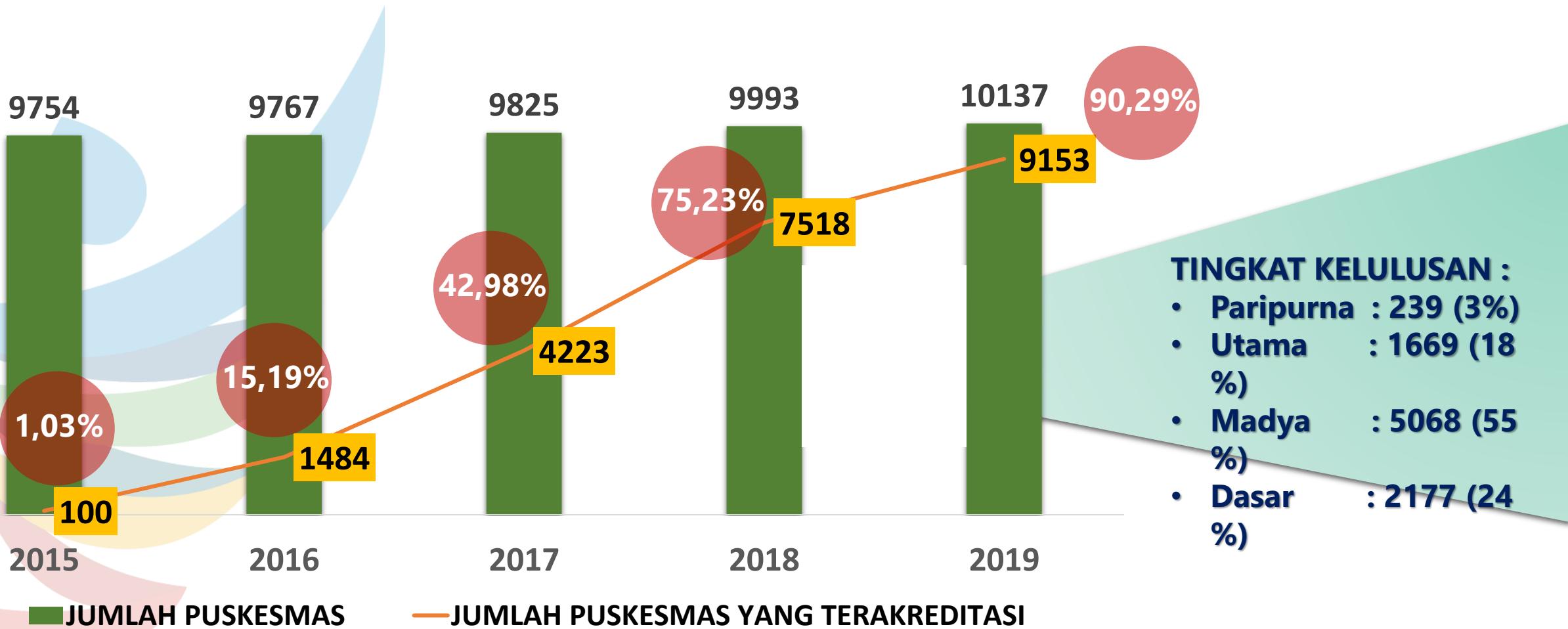
## PERBAIKAN DALAM PELAKSANAAN :

- **TATA KELOLA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**
- Tata Kelola Manajemen
  - Tata Kelola Upaya Kesehatan perorangan

 dalam mendukung **Promotif – Preventif** dan pencapaian Prioritas Nasional (Stunting, AKI-AKN, Imunisasi, TB, dan PTM)



# TREND PUSKESMAS TERAKREDITASI



# TANTANGAN PENYELENGGARAAN

**PEMBIAYAAN  
DIANGGAP MAHAL**



- Kondisi sub standar (tidak memenuhi persyaratan izin operasional Puskesmas (PMK. 75/2014) → mengeluarkan biaya untuk memenuhi SDM, sarana, prasarana dan alat kesehatan)
- Sebagain penugasan Surveyor belum berdasarkan regionalisasi.
- Pendampingan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota kurang optimal sehingga ada Puskesmas yang memanfaatkan lembaga Konsultan swasta

**SURVEIOR**



- Jumlah & Distribusi Surveyor
- Potensi Gratifikasi & pelanggaran etika
- Subjektifitas surveyor
- Surveyor ASN meninggalkan tugas cukup lama karena menjalankan tugas survei
- Penyambutan surveyor yang berlebihan

**PENERAPAN STANDAR  
BELUM MENJADI  
BUDAYA**



**persiapan** akreditasi dilakukan menjelang survei (persiapan dokumen, internalisasi standar, dll) sehingga menyita waktu → mempengaruhi pelayanan

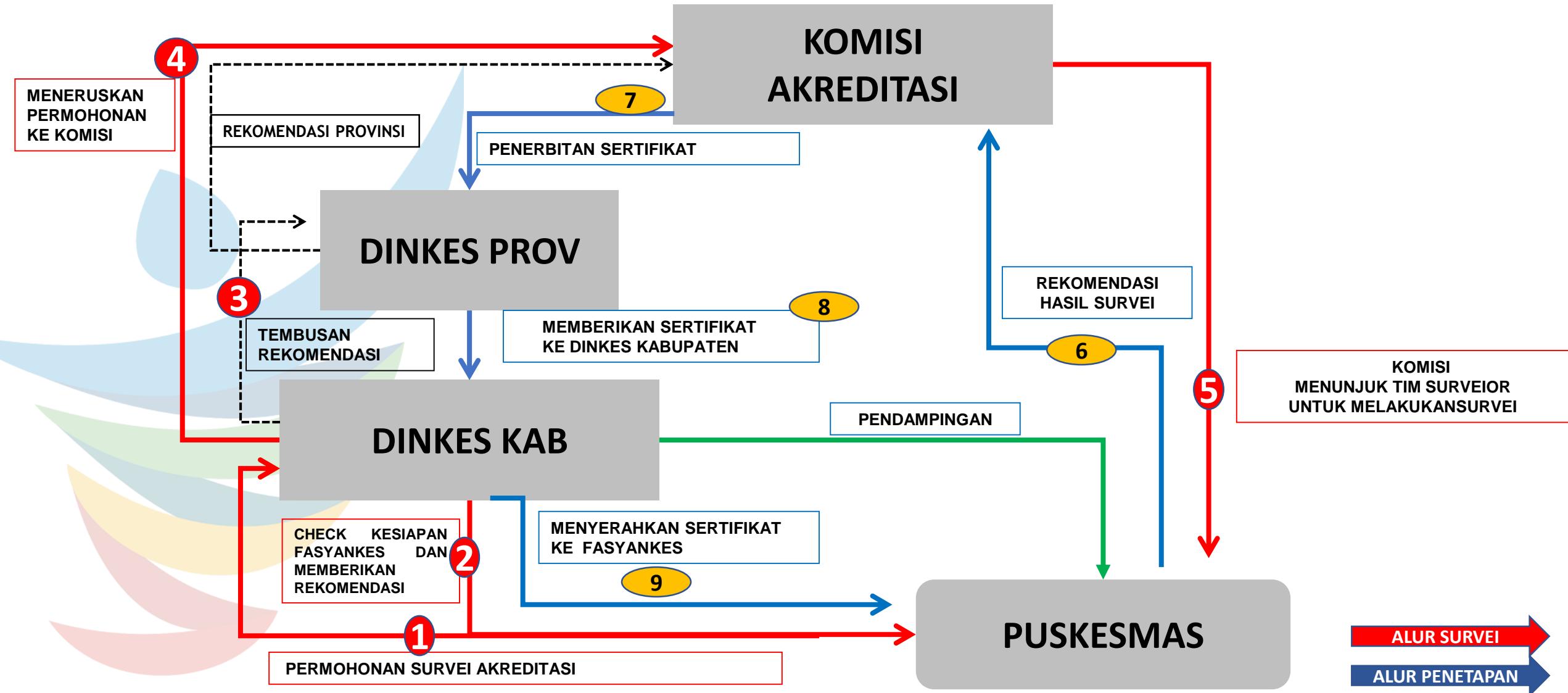
**IMPLEMENTASI STANDAR AKREDITASI  
TERKESAN BERFOKUS UKP  
DAN KURANG MENDUKUNG  
PERBAIKAN PELAYANAN  
PROMOTIF PREVENTIF**



# KONSEP PENYELENGGARAAN AKREDITASI PUSKESMAS

---

# MEKANISME PENYELANGGARAAN AKREDITASI FKTP (SESUAI PMK 46/2015)



# SISTEM PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS

Konsep Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas menggambarkan tentang Peningkatan mutu Puskesmas sebagai sebuah system yang disebut Sistem Peningkatan Mutu Puskesmas (SPM-P), yang terdiri dari 2 sub yaitu:

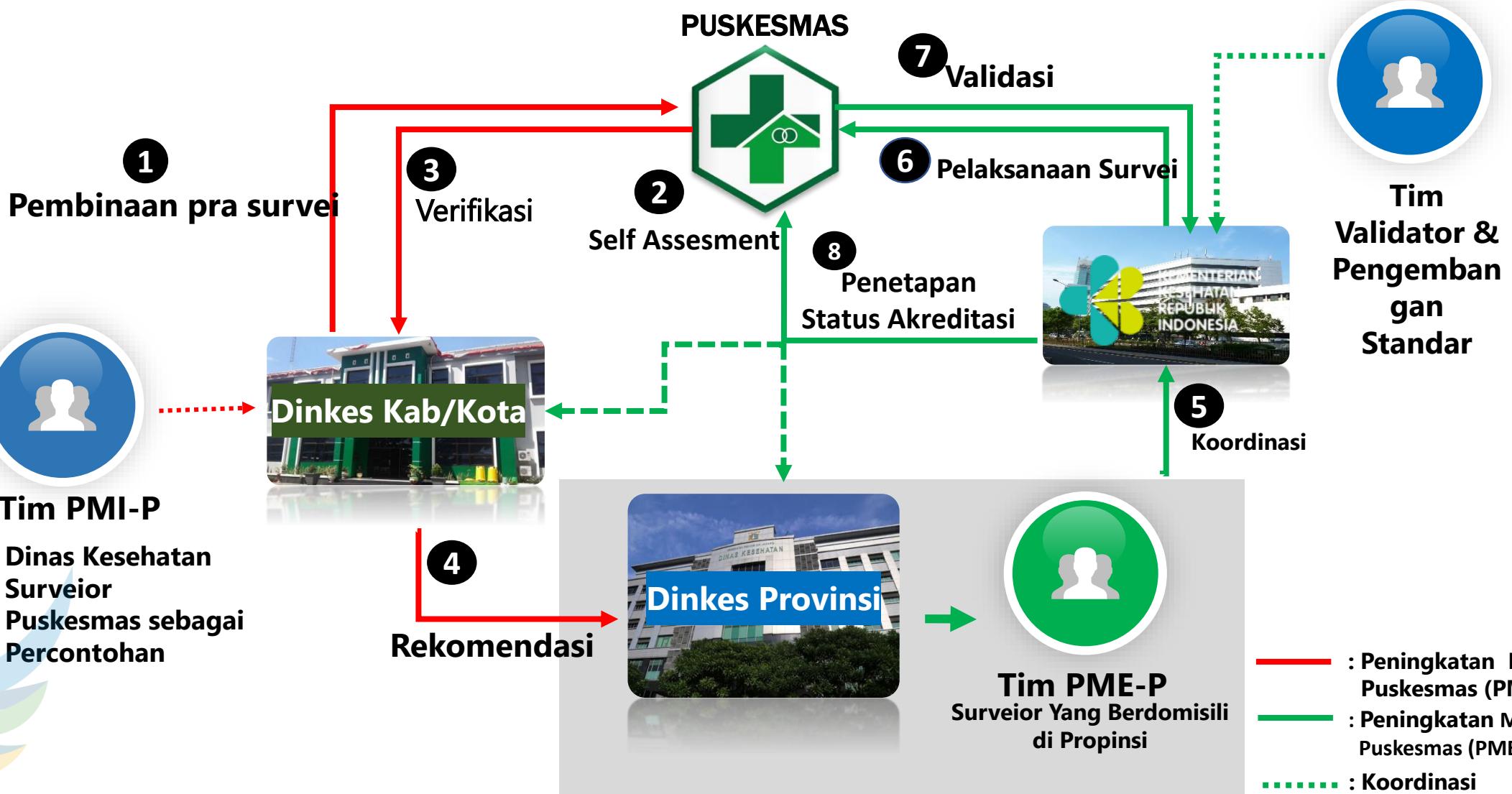
1. Sistem Peningkatan Mutu Internal Puskesmas (SPMI-P)
2. Sistem Peningkatan Mutu Eksternal Puskesmas (SPME-P) atau Akreditasi



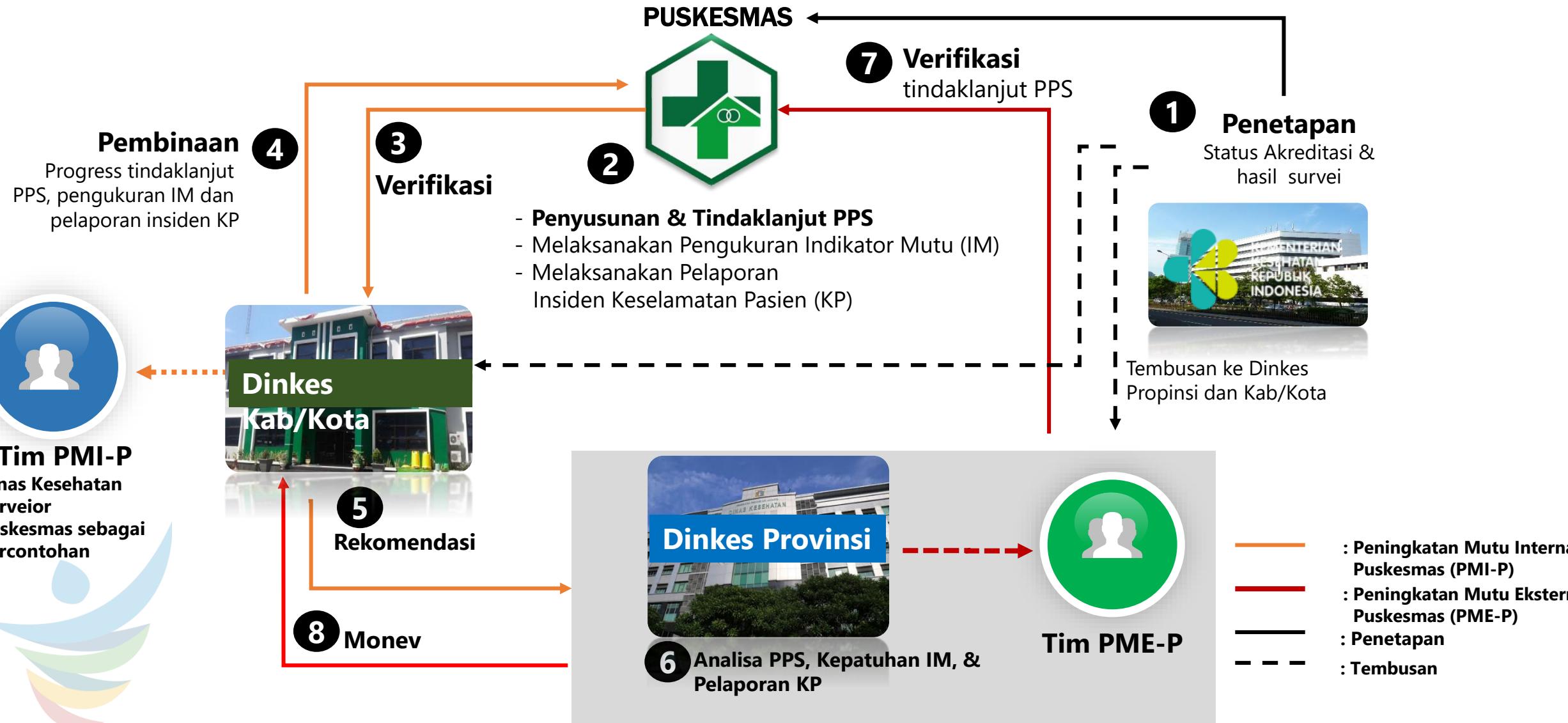
Sistem Peningkatan Mutu **Internal (SPMI)** merupakan kegiatan sistemik dalam membangun budaya mutu yang **difasilitasi** oleh Tim Peningkatan Mutu Internal Puskesmas (PMI-P) yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan daerah Kab/Kota.

Sistem Peningkatan Mutu **Eksternal (SPME)** merupakan kegiatan penilaian mutu melalui Akreditasi oleh Tim Peningkatan Mutu Eksternal Puskesmas (PME-P) di tingkat Propinsi yang **ditugaskan** oleh Kementerian Kesehatan.

# MEKANISME PENYELENGGARAAN SURVEI AKREDITASI PUSKESMAS (USULAN)

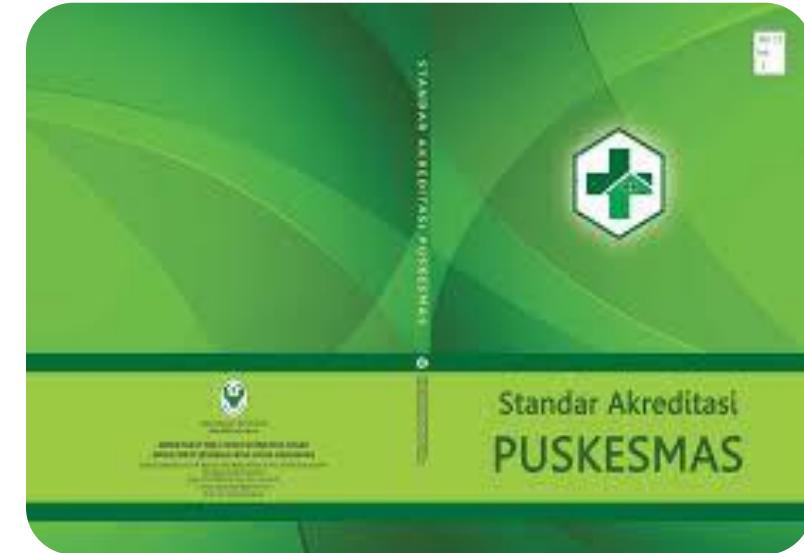


# MEKANISME PEMBINAAN PASCA AKREDITASI



# GAMBARAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN AKREDITASI PUSKESMAS

URAIAN	Versi 2015	Versi 2019	Versi 2020
<b>PERAN KEMENTERIAN KESEHATAN</b>	Kementerian menyelenggarakan Kesehatan akreditasi FKTP melalui penetapan Komisi Akreditasi FKTP sebagai penyelenggara	Kementerian menyelenggarakan Kesehatan akreditasi FKTP melalui penetapan Komisi Akreditasi FKTP sebagai penyelenggara	Kementerian Kesehatan menyelenggarakan akreditasi: penugasan surveior, proses validasi dan status akreditasi Puskesmas.
<b>PERAN DINNES PROVINSI</b>	Mengeluarkan rekomendasi usulan survei berdasarkan usulan Dinkes Kab/Kota		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengorganisir pelaksanaan survei akreditasi Tim PME melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>Melakukan verifikasi upaya mempertahankan &amp; meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar</li> </ul>
<b>PERAN DINNES KAB/KOTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun roadmap akreditasi</li> <li>Melakukan pendampingan pra dan pasca akreditasi oleh tim pendamping terlatih</li> <li>Pengusulan Survei akreditasi ke Dinkes Provinsi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pembinaan dan verifikasi dalam memenuhi, mempertahankan dan meningkatkan upaya mutu di Puskesmas sesuai standar</li> </ul>
<b>WAKTU SURVEI</b>	3 hari efektif	3 hari efektif	2 hari efektif
<b>SURVEIOR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 surveior</li> <li>Pusat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 surveior</li> <li>Pusat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 surveior</li> <li>Regionalisasi</li> </ul>

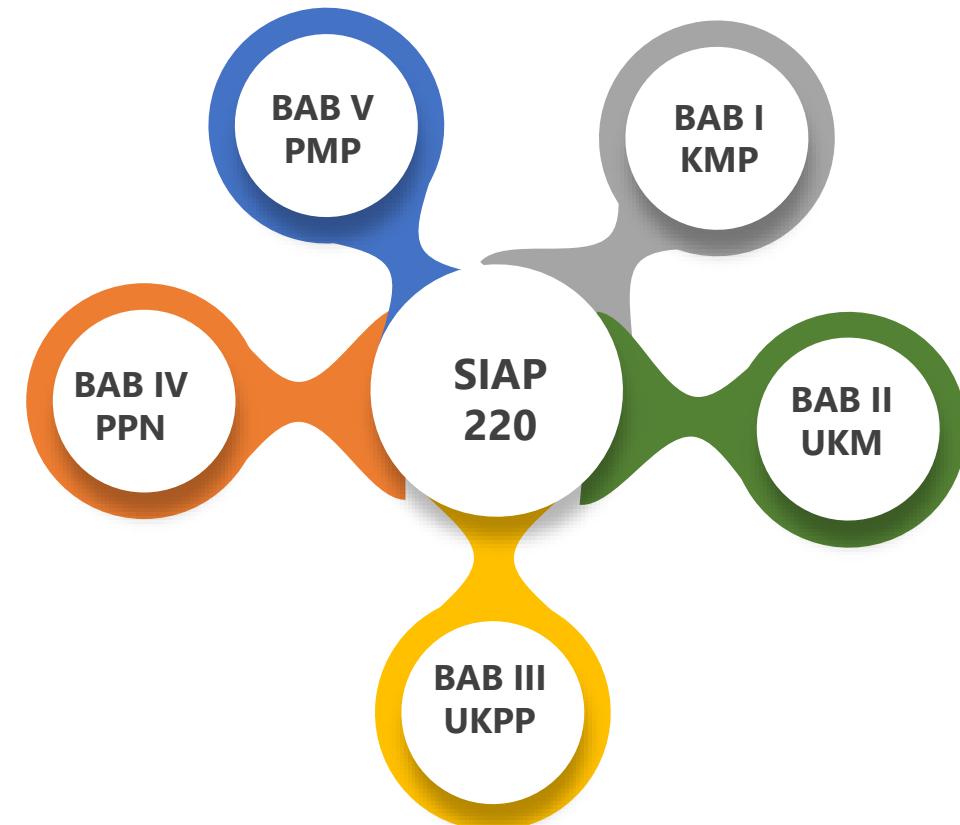


# OVERVIEW STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS TAHUN 2020 (SIAP2020)

# GAMBARAN PENGEMBANGAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS

URAIAN	Versi 2015	Versi 2019	Versi 2020
<b>BAB</b>	9	5	5
<b>STANDAR</b>	42	37	34
<b>KRITERIA</b>	168	132	82
<b>ELEMEN PENILAIAN (EP)</b>	766	500	318
<b>ISI</b>	Isi standar belum mencantumkan PPN dan UKM esensial secara tersurat	Isi standar sudah mencantumkan PPN dan UKM Esensial serta pengembangan namun belum mencantumkan promotif dan preventif dengan prinsip five level prevention	Standar akreditasi Puskesmas difokuskan upaya promotif dan preventif pada Program Prioritas Nasional (PPN)
<b>BAB MUTU</b>	Tersebar di bab 3, bab 6 dan bab 9	Disatukan dalam satu BAB yang difokuskan peningkatan mutu upaya promotif – preventif pada Program Prioritas Nasional	Disatukan dalam satu BAB yang difokuskan peningkatan mutu upaya promotif – preventif pada Program Prioritas Nasional

# STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS TAHUN 2020



BAB	STANDAR	KRITERI A	ELEMEN PENILAIAN
KEPIMPINAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)	7	24	83
PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ( <i>Community-based care</i> )	8	20	104
PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN & PENUNJANG (UKPP)	9	13	48
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (PPN)	5	5	38
PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS (PMP)	5	18	41
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>82</b>	<b>318</b>

# BAB I – KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS

BAB	STANDAR	JUMLAH	
		KRITERI A	EP
I KMP	1.1 PERENCANAAN (RUK, RPK, PENGEMBANGAN PELAYANAN)	3	9
	1.2 AKSES ( INFORMASI, PELAYANAN, UMPAN BALIK)	2	4
	1.3 TATA KELOLA ORGANISASI PUSKESMAS (Struktur, Regulasi, Jaringan & Jejaring, Manajemen Data, K3)	5	18
	1.4 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (Ketersediaan jumlah & jenis, Uraian tugas, Dokumen Kepegawaian, Orientasi)	4	10
	1.5 MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK) PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA (PKP, PENGUKURAN INDIKATOR MUTU, LOKAKARYA MINI & LINSEK, AUDIT INTERNAL & RTM)	6	20
	1.6 PERAN DINAS KESEHATAN KAB.KOTA DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS MLL AKREDITASI	3	9
	1.7 PERAN DINKES KAB/KOTA	1	13
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>		<b>83</b>
		<b>24</b>	



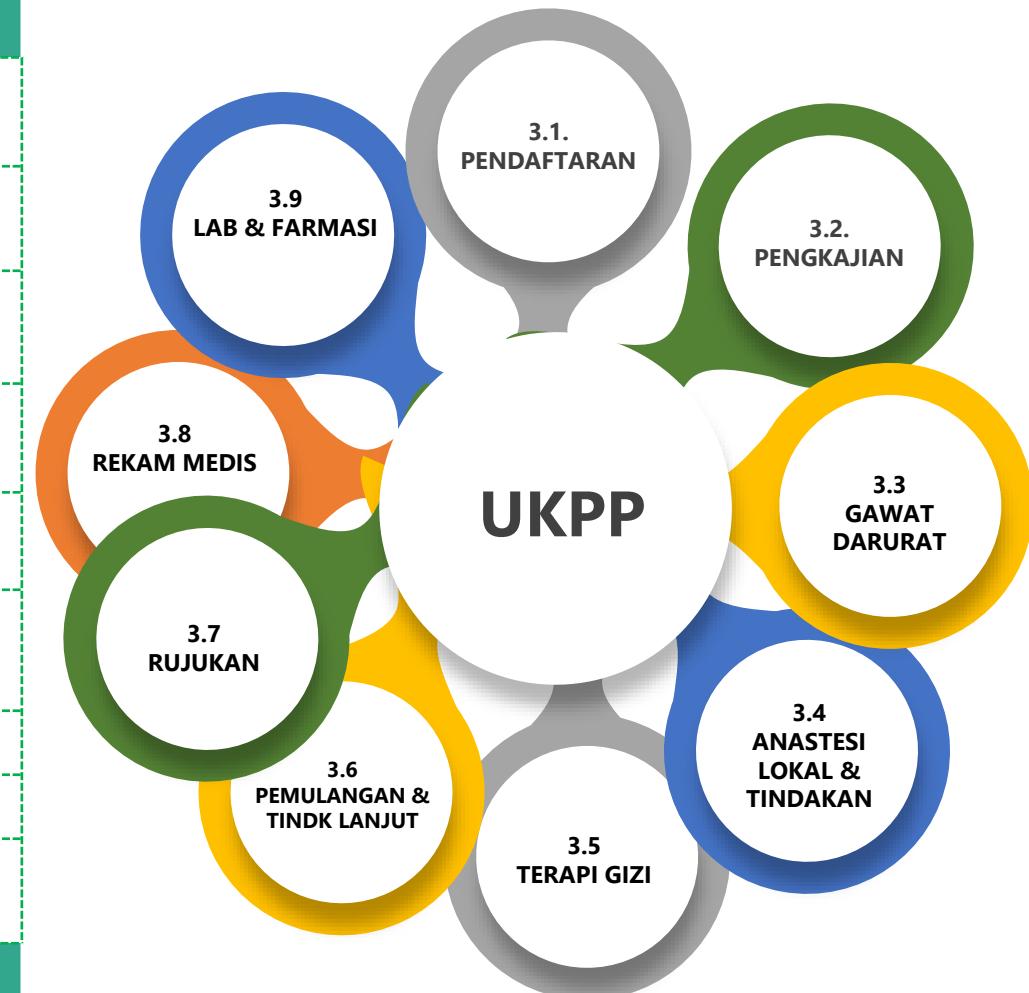
## BAB II – PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT



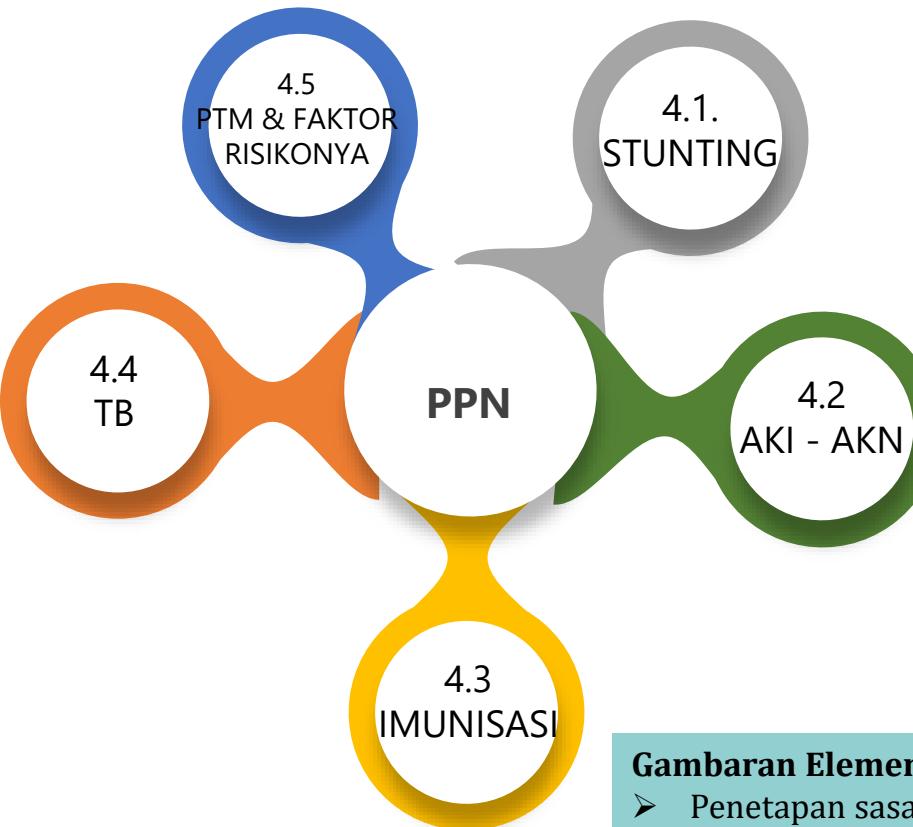
BAB	STANDAR	JUMLAH	
		KRITERIA	EP
2. UKM	2.1. PERENCANAAN UKM (keterpaduan program, pemberdayaan Masyarakat, RUK-RPK)	3	13
	2.2. AKSES PELAYANAN UKM	2	8
	2.3. TATA KELOLA UKM (PENGERAKAN & PELAKSANAAN PELAYANAN UKM)	1	2
	2.4. PEMBINAAN UKM	1	4
	2.5. PIS-PK DAN GERMAS	3	17
	2.6. PENYELENGGARAAN UKM ESENSIAL	5	30
	2.7. PENYELENGGARAAN UKM PENGEMBANGAN	1	7
	2.8. WASDALI UKM	4	23
TOTAL	7	20	104

## BAB III – PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN DAN PENUNJANG (UKPP)

BAB	STANDAR	JUMLAH		EP
		KRITERIA		
3	3.1. PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN	1	5	
	3.2. PENGKAJIAN, RENCANA ASUHAN & PEMBERI ASUHAN DILAKUKAN SCR PARIPURNA	1	9	
	3.3. PELAYANAN GAWAT DARURAT	2	4	
	3.4. PELAYANAN ANESTESI LOKAL & TINDAKAN DI PUSKESMAS	2	5	
	3.5. TERAPI GIZI	1	3	
	3.6. PEMULANGAN & TINDAKLANJUT	1	2	
	3.7. RUJUKAN	2	7	
	3.8. PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS	1	3	
	3.9. PENYELENGGARAAN LABORATORIUM & KEFARMASIAN	2	10	
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>48</b>	



## BAB IV – PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (PPN)



BAB	STANDAR	JUMLAH	
		KRITERI A	EP
4 PPN	4.1. PENCEGAHAN & PENURUNAN STUNTING	1	8
	4.2 PENURUNAN AKI-AKB	1	9
	4.3 PENINGKATAN CAKUPAN & MUTU IMUNISASI	1	8
	4.4 PENANGGULANGAN TB	1	7
	4.5 PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM) & FAKTOR RISIKONYA	1	6
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>38</b>

### Gambaran Elemen Penilaian antara lain:

- Penetapan sasaran
- Tercapainya indikator yang telah ditentukan
- Penetapan program kerja melalui upaya-upaya promotive dan preventif
- Pelaksanaan kegiatan yang dikoordinasikan lintas program dan lintas sektor
- Pemantauan dan evaluasi serta tindaklanjut sesuai hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi
- Pencatatan dan pelaporan sesuai prosedur yang telah ditetapkan

### Perbedaan antar program berada pada:

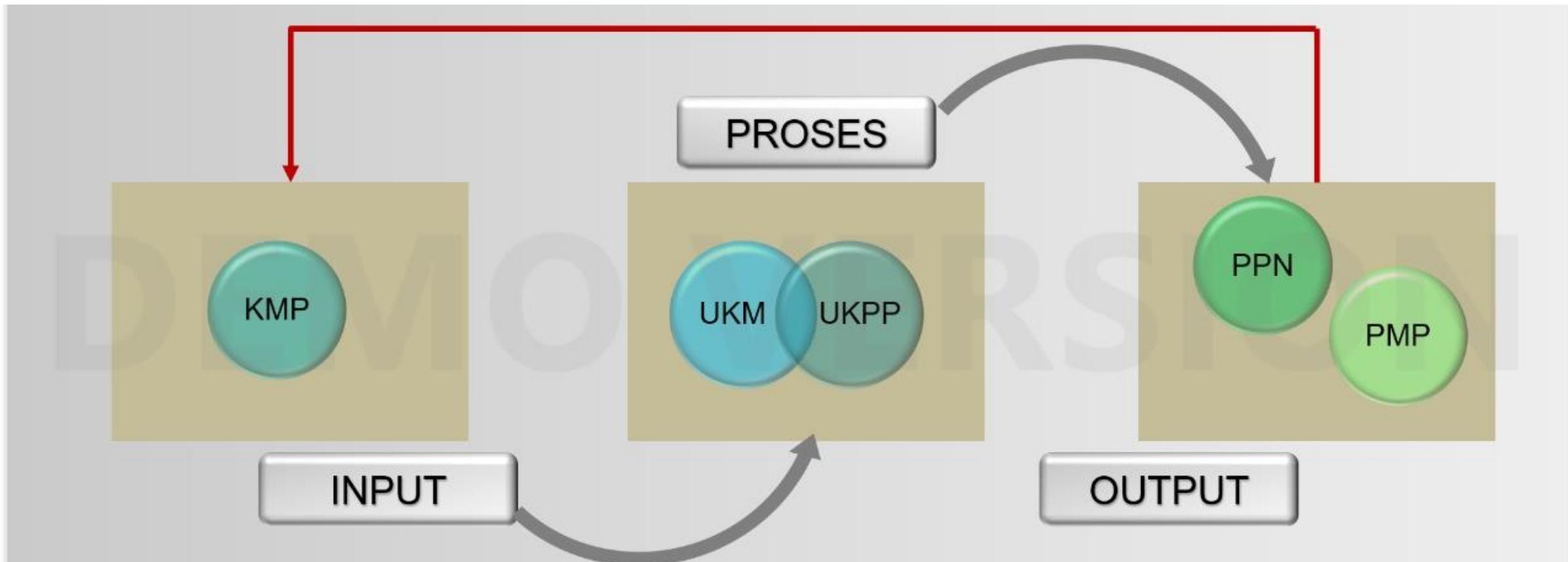
- Ketersediaan logistic (obat, vaksin) termasuk pengelolaannya misal rantai vaksinnya, serta ketersediaan peralatan
- Penatalaksanaan pengobatan sesuai dengan PPK I

## BAB V – PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS (PMP)

BAB	STANDAR	JUMLAH		
		KRITERI A	EP	
5 PMP	5.1. PROGRAM PENINGKATAN MUTU TERMASUK PENGUKURAN INDATOR MUTU	5	11	
	5.2. MANAJEMEN RISIKO	2	6	
	5.3. SASARAN KESELAMATAN PASIEN	5	11	
	5.4. PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN	2	4	
	5.5. PENCEGAHAN & PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)	6	13	
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	



# KONSEP PENDEKATAN AKREDITASI PUSKESMAS DENGAN STANDAR & INSTRUMEN AKREDITASI TAHUN 2020



KMP : KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS

PMP : PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS

UKM : UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

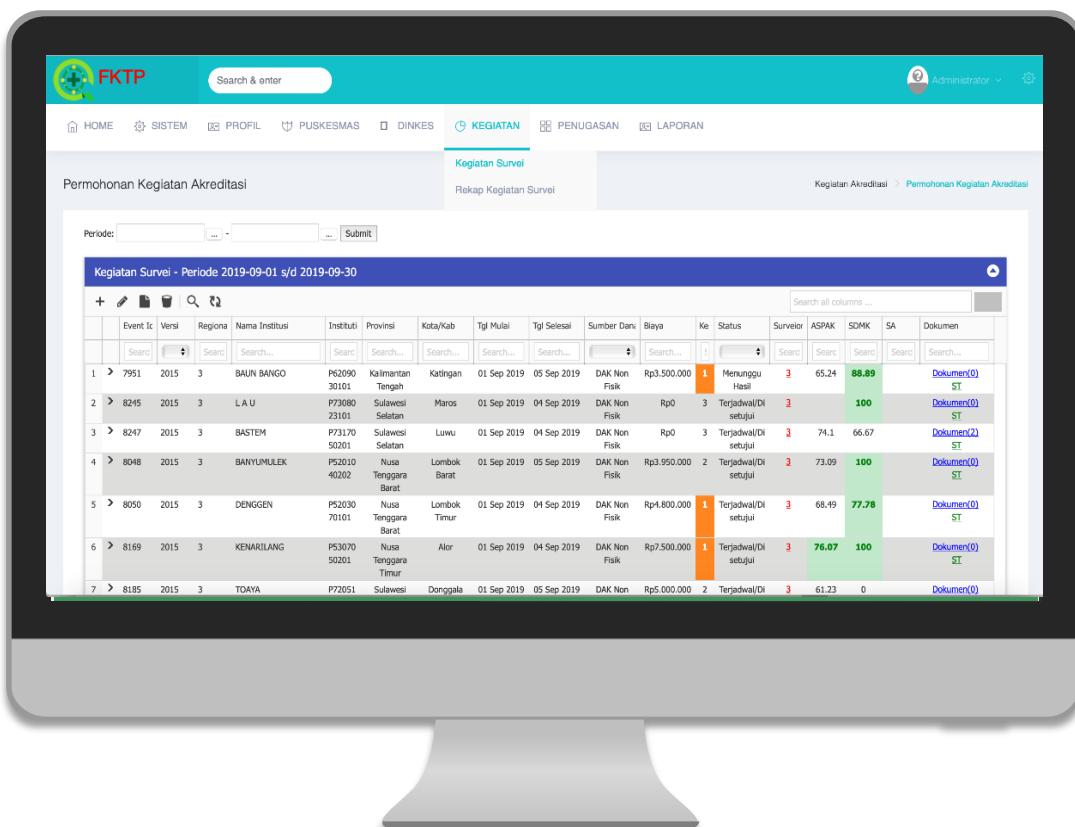
UKPP : UPAYA KESEHATAN PERORANGAN & PENUNJANG



## MELALUI SISTEM INFORMASI AKREDITASI FKTP (SIAF) -PUSKESMAS

# DUKUNGAN IT DALAM PENYELEGGARAAN AKREDITASI

# SISTEM INFORMASI AKREDITASI FKTP (SIAF) - PUSKESMAS



## MENU PUSKESMAS

1. Aplikasi Survei
2. Profil Puskesmas
3. Self Assessment
4. Surat permohonan survei Puskesmas
5. Surat Usulan Survei Kab kota
6. Surat Rekomendasi Provinsi

## MENU SURVEIOR

1. Rekruitmen Surveyor
2. Profile Surveyor
3. Penugasan Survey
  - Kesediaan Survey
  - Penugasan & Jadwal
  - Waktu Survey Yang Diinginkan
4. Kegiatan Survey
5. Laporan Survey



# Terima kasih

---

Sehat!  
dimulai  
dari saya



@KemenkesRI



Kementerian  
Kesehatan RI



kemenkes\_ri

Salam  
Sehat